



WARGA RAYAKAN HARI HAK UNTUK TAHU

Keterbukaan Informasi Cegah Korupsi

YOGYA (MERAPD) - Setiap kebijakan yang ditelurkan pemerintah, seharusnya disertai dengan keterbukaan informasi kepada publik. Tujuannya, agar publik menjadi paham, apa dasar pengambilan kebijakan tersebut, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat, serta berapa anggaran yang dikucurkan dalam setiap tahapan realisasinya.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan aksi damai elemen masyarakat bersama Komisi Informasi dan Penyiaran (KIP) DIY sebagai rangkaian event Toegoe Jogja Festival (TJF) hasil kerja sama PT BP KR dengan KIP DIY dan sejumlah pihak terkait, di halaman Kantor SKH KR Jalan Margo Utomo Yogya, Minggu (11/10). Berorasi dari halaman Kantor KR menuju pelataran Tugu, aksi damai ini menunjukkan sejumlah rontek di antaranya bertuliskan 'Hak untuk Tahu Milik Rakyat', 'Memohon Informasi Bukan Kejahatan', 'Jaman Penak Golek Info', 'Keterbukaan Informasi Jadi Budaya Bangsa, dan sebagainya.

Salah satu warga Yogya yang ikut berorasi, Deny Adi Pratama (19) menilai, saat ini pemerintah belum membuka seluruh informasi terkait kebijakan yang ditelurkan.

* Bersambung ke halaman 9

Masyarakat berorasi dengan membaca rontek dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu.

Keterbukaan

Padahal informasi tersebut, seharusnya bisa menjadi hak asasi masyarakat sebagai obyek kebijakan.

"Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah berkewajiban membuka informasi ke masyarakat terutama terkait program dan kebijakan mereka. Pembangunan hotel di Yogya misalnya, kita sebagai masyarakat, sama sekali tidak mengetahui apa alasan pemerintah mengizinkan pembangunan hotel yang terus menerus," urai mahasiswa Fakultas Hukum UII ini.

Deny Adi menilai, ketidaktransparan pemerintah dalam setiap program dan kebijakan, benar-benar merugikan masyarakat sebagai obyeknya. Sebab, masyarakat akan kesulitan mengawasi jalannya pemerintahan serta tidak bisa menegak dampak buruk yang ditimbulkan.

"Rentan terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintah, juga memicu korupsi yang rakyat," imbuhnya.

Ketidaktransparan pemerintah dalam realisasi program dan kebijakan, juga dirasakan Staf Pengaduan Ombudsman DIY, Azam Anwar (29).

Azam yang juga andil dalam aksi damai tersebut mengungkapkan, Ombudsman DIY banyak menerima aduan dari masyarakat terutama soal pendidikan, keuangan dan perzinahan.

"Aduan tentang izin pembangunan hotel memang mendominasi. Masyarakat melapor ke kami, karena tidak pernah mendapat informasi apapun tentang pembangunan hotel, meski mereka merupakan pihak yang terdampak. Sementara untuk pendidikan, lebih ke pungutan di sekolah, kemudian keuangan adalah soal kredit macet," ungkapnya.

Menanggapi aduan tersebut, kata Azam, Ombudsman DIY kemudian mengklarifikasi ke pihak terkait, sekaligus mendesak mereka untuk lebih transparan ke masyarakat. Idealnya, pemerintah menyampaikan informasi tersebut melalui internet agar bisa diakses oleh masyarakat.

"Tapi yang terjadi saat ini, website pemerintah justru tidak update. SMS gateway juga tidak ada. Masyarakat akan dibuat bingung jika tidak ada keterbukaan informasi dari pemerintah," ulasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KIP DIY, Istiatun menyampaikan, aksi damai dalam even TJF digelar untuk mengingatkan Hari Hak untuk Tahu yang jatuh pada 28 September. Masyarakat diingatkan bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui kegiatan dan penggunaan dana yang dilakukan badan publik atau pemerintah.

"Kita menyerukan kepada masyarakat agar mengu-

Tindak Lanjut

1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Negatif
 Positif
 Netral

Sambungan halaman 1

nakan hak tersebut agar masyarakat berbagai elemen berorasi menyerukan keterbukaan informasi publik. Diharapkan aksi damai ini akan berujung pada jalannya pemerintahan yang transparan dalam setiap program dan kebijakan. (Unt)-e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005